

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008
- Arie Sukanti Hutagalung, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- _____, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 10, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Anton M. Moelino, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008.
- A.P. Parlindungan, *Serba Serbi Hukum Agraria*, Alumni, Bandung, 1984.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Grasindo, Jakarta, 2002.
- _____, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- _____, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2006.
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Menemukan Dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- DR. Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum-Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung.
- Erna Sri Wibawanti, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Liberty, Yogyakarta, 2013.

- Fakultas Hukum Universitas Pasundan, *Panduan Penyusunan Penelitian Hukum*, Bandung, 2016.
- _____, *Panduan Penyusunan Penelitian Hukum*, Bandung, 2016.
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960*, Tambahan Lembar Negara Nomor 2043.
- _____, *Peraturan tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai*, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, TLN No. 3643, Pasal 1.
- Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011.
- J.H. Nieuwenhuis, terjemahan Djasadin Saragih, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Airlangga University Press, Surabaya, 1985.
- Mochtar Kusumaadmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976
- Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1982.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2013.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- _____, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- _____, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1992.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- _____, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 1999.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- R. Subekti Dan R. Tjittrosudibio, *Kitab Undang -undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramitha, 1992.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2003.
- _____, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009.

- Sunaryo Basuki, *Hukum Tanah Nasional Landasan Hukum Penguasaan Dan Penggunaan Tanah*, 2002.
- Sudikno Mertokusumo, *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019.
- Soebekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2000.
- Sri Sayekti, *Hukum Agraria Nasional*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2000.
- Ter Haar, *Beginnselen en stelsel van het Adatrecht*, Bhratara, Djakarta, 1962.
- Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2011.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya
- Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1966 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1997 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan

Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pelaksanaan Konveksi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara Dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah

C. Sumber Lainnya

Fence M. Wantu, 2007, "*Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*", Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Oktober, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 388, Vol. 19, No. 3.

Mudjiono, 2007, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan*, Jurnal Hukum, Juli, Vol.14, No.3, hlm.466

Merry Tjoanda, 2010, *Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Sasi, Oktober, Vol.16, No. 4.

Dedy Pramono, 2015, *Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, *Lex Jurnalica*, Desember, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, hlm. 249, Vol. 12 No. 3.

Sedyo Prayogo, 2016, *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Vol. III, No. 2.

Harumi Chandraesmi dan Pranoto, 2017, *Kajian Mengenai Gugatan Melawan Hukum Terhadap Sengketa Wanprestasi*, Universitas Sebelas Maret, Vol. 5, No. 1.

<http://digilib.unila.ac.id/8888/12/BAB%202.pdf>, diunduh pada Selasa, 15 Oktober 2019, pukul 23.17 WIB

Alfina Fajrin, *Indonesia Sebagai Negara Hukum*, <https://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/indonesia-sebagai-negara-hukum>, diunduh pada Senin, 21 Oktober 2019, Pukul 17.37 WIB.

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>, diunduh pada Selasa, 22 Oktober 2019, Pukul 01.31 WIB.

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>, diunduh pada Selasa, 22 Oktober 2019, pukul 02.13 WIB.

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://repository.unpas.ac.id/36011/1/J.%2520BAB%2520II.pdf>, diunduh pada Selasa, 29 Oktober 2019, pukul 03.14 WIB.

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*,
[http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep Negara Hukum Indonesia.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf), diunduh pada Selasa, 12 November 2019, Pukul 23:33.